

**PENGARUH FOREIGN DIRECT INVESTMENT TERHADAP PEREKONOMIAN
MASYARAKAT DUMAI PASCA BERLAKUNYA MASYARKAT EKONOMI ASEAN**

Oleh:
Rachmat Kurniawan
Pembimbing: Afrizal, S.IP, MA

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/fax. 0761-63277

Abstract

This research describes the strategy of Government of Dumai City toward an Asean Economic Community in 2012-2015. Asean Economic Community are held by Asean Member state toward a China, India and Japan economic growth. In order that Asean Economic community make a common market to integrated the market in Asean and it will be power to support the economic growth of Asean members.

The research method used was a qualitative with descriptive as a technic of the research. Writer collects data from books, encyclopedia, journal, mass media and websites to analyze the strategy of Government of Dumai City toward an Asean Economic Community. The theories applied in this research are Neo liberalism perspective with the Foreign direct investment.

The research shows that strategy of Government of Dumai City toward an Asean Economic Community are built in economic and infrastructure. Some of policies are Government of Dumai are increase of foreign invest in Dumai City, create a some regulations in investment trade, increase a growth of infrastructure and Government of Dumai city had implemented of creative economi by saving model in everysubdistrict in Dumai City.

Key words : Foreign Direct Investment (FDI), Dumai, economic community

1. PENDAHULUAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampak FDI (*Foreign Direct Investment*) oleh Singapura, dan Tiongkok terhadap Masyarakat Indonesia. Penelitian ini memfokuskan pada Dampak yang diterima oleh Masyarakat setempat (Masyarakat Kota Dumai), terhadap Perusahaan yang berinvestasi di Negara ini (Kota Dumai).

Menurut Departemen Luar Negeri (Deplu) RI, efektivitas pelaksanaan kebijakan luar negeri suatu negara akan terjadi, apabila dilakukan secara sinergi dengan keterlibatan para pemangku kepentingan yang berwujud pada “total diplomasi”.¹ Dalam rangka mendukung diplomasi perdagangan luar negeri Indonesia dan strategi total diplomasi tersebut, Gubernur Bank Indonesia, Burhanuddin Abdullah dan Menteri Luar Negeri RI, Nur Hasan Wirajuda menandatangani Nota Kesepakatan mengenai kerja sama peningkatan profesional diplomasi ekonomi di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran. Nota kesepakatan yang ditandatangani pada tanggal 1 April 2008 ini dapat dilihat sebagai wujud dari kegiatan bersama, dalam rangka melakukan total diplomasi ekonomi. Adapun bentuk kegiatan tersebut antara lain berupa pertukaran informasi dengan para investor global dan pemantauan pasar global.² Signifikansi diplomasi ekonomi adalah untuk menggunakan pengaruh dan hubungan politik dengan beberapa tujuan. Tujuan tersebut antara lain untuk mempromosikan perdagangan internasional dan investasi,

meningkatkan fungsi pasar, mengurangi biaya dan resiko dari transaksi antar wilayah, mencapai standar internasional, mengamankan hak properti privat (Private property rights), mengembangkan telekomunikasi internasional, energi dan jaringan transportasi, serta yang terutama adalah mengonsolidasikan iklim politik secara tepat untuk menfasilitasi tujuan-tujuan tersebut.³

FDI (*Foreign Direct Investment*) adalah bentuk investasi yang ditanamkan langsung dan bergerak di berbagai bidang. Di dalam arus FDI tidak termasuk investasi portfolio global berbentuk saham lewat jual beli di bursa, obligasi dan surat berharga lainnya.⁴

Arus Modal yang masuk dari luar negeri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu utang luar negeri, investasi portfolio, dan penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment*). Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, dan berlangsung secara berkesinambungan. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bidang yang penting adalah pembangunan bidang ekonomi.

Pada Laporan tahunan UNCTAD (2001), World Investment Report, mengemukakan bahwa pertumbuhan FDI di seluruh dunia mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 1990, 1997 dan tahun 2000, yakni berturut-turut USD 209 juta, USD 437 juta, dan USD 1.118 juta. Ini menunjukkan bahwa financial crisis yang

¹ Lihat the Jakarta Post, 16 Desember 2009, “Indonesia-China Free Trade Agreement Rules to Start in January 2010”, <http://www.e-to-dina.com> (diunduh 4 februari 2017)

² Departemen Luar Negeri, “Politik Luar Negeri”, http://www.deplu.go.id/?hotnews_id=45,22september2005,hlm.1.

³ Biro Hubungan masyarakat, Bank Sentral R.i “Hadapi Tantangan Global, BI dan Deplu Perkuat Kerja sama”, Jakarta, 1 April 2008, hlm. 14.

⁴ Memahami Investasi Langsung Luar Negeri. (Diakses dari: <http://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/fid.html> pada tanggal 23 januari 2017, pukul 09:00 WIB)

terjadi di Negara negara berkembang, tidak mengganggu aliran modal ini untuk terus berkembang. beberapa ahli telah memperkuat argumen bahwa peranan FDI relatif besar dalam pembangunan suatu negara. Penelitian Terpstra dan Yu (1988) menemukan bahwa ukuran pasar (market size) yang diukur dengan GDP perkapita, faktor kedekatan geografis negara penerima dan penanaman modal, besarnya perusahaan, reaksi oligopolistik merupakan faktor penentu masuknya modal asing ke suatu Negara. Penelitian Rana dan Dowling (1988) mengenai pengaruh penanaman modal asing terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di negara-negara sedang berkembang, menyimpulkan bahwa modal asing memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan dan tabungan domestik di negara-negara berkembang di Asia

Sebagai negara berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut terjadi karena adanya upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju, baik di kawasan regional maupun kawasan global. Indonesia masih belum mampu menyediakan dana pembangunan tersebut. Disamping berupaya menggali sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri, salah satunya adalah Penanaman Modal Asing Langsung (foreign direct investment).

1.2 Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar pemikiran diperlukan oleh penulis untuk menetapkan tujuan dan arah sebuah penelitian serta memilih konsep

⁵ Winarno Surakmat, *Pengantar Metode ilmiah*. Bahan Penerbit IKIP. Bandung. 1968. Hlm.25

⁶ Mochtar Mas' oed, Ilmu Hubungan Internasional: *Disiplin dan Metodologi*. LP3S. Jakarta. 1990, hlm. 186.

⁷ *Ibid*

yang tepat untuk pembentukan hipotesa dan pembahasan kerangka dasar teori. ini dikemukakan dengan menjelaskan paradigma, tingkat analisa, konsep dan teori yang relevan terhadap pengaruh investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Dumai, Provinsi Riau.

Menurut Winarno Surakmat, Kerangka dasar teori adalah sebagai pegangan pokok umum atau pedoman untuk mengumpulkan data, kemudian dari data tersebut disusun sistematika pemikiran yang mempunyai arti.⁵ Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut logika menjadi suatu bentuk pernyataan, sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah.⁶ Selain itu, Teori juga dapat membantu menjelaskan fenomena ekonomi, politik, sosial dan budaya yang ada, dengan demikian dapat membantu pembuatan kebijakan.⁷

Pada penelitian ini, penulis menggunakan perspektif neoliberal, dan teori Foreign direct investment, serta menggunakan konsep *Multinational Coorporation*.

Perspektif Neoliberalisme

Menurut neoliberal negara merupakan aktor utama dalam politik internasional. Neoliberal memandang bahwa negara merupakan aktor rasional yang egois, Negara akan selalu berupaya memaksimalkan kepentingan sendiri tanpa memperdulikan keuntungan atau kerugian yang didapat oleh negara lain.⁸ Pemerintah perlu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melahirkan keadaaan-keadaan ekonomi

⁸ Robert Keohane, After Hegemony: *Cooperation and Discord in the World Political Economy* (Princeton, New Jersey:Princeton University Press, 1984), hlm.27.lihat pada Richard W. Mansbach & Kirsten L. Rafferty, *Pengantar Politik Global* (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm.305

domestik yang dapat menarik investasi asing ke dalam wilayah negara mereka.⁹

Sudut pandang neoliberal berpendapat, kebanyakan negara tidak dapat menghidupkan kekayaan endogen yang dapat mencukupi pembiayaan dalam perkembangan ekonomi negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melahirkan keadaan-keadaan ekonomi domestik yang dapat menarik investasi asing ke dalam wilayah negara mereka.¹⁰

Neoliberalisme merupakan metamorfosis dari liberalisme klasik, neoliberalisme ini memiliki perbedaan epistemologis yang cukup substansial dari liberalisme klasik. Jika liberalisme klasik memandang ekonomi hanya sebagai salah satu model hubungan antar aktor, lebih jauh neoliberalisme ini mengembangkan paradigma ekonomi sebagai basiss epistemologis dalam memandang setiap relasi antar aktor, baik individu, masyarakat, maupun negara dan hubungan internasional.

Menurut pada pengertian neoliberalisme sebagai varian baru dari liberalisme. Sebelumnya, liberal dalam pemaknaan awalnya adalah sebuah mekanisme pasar yang bebas dari intervensi Negara. Pemaknaan ini berubah ketika ekonomi Keynesian menjadi paradigma mainstream. Keynes melakukan penguatan pada negara dalam pengendalian dan penguatan pasar, namun tetap menolak kecendrungan pemaknaan sosialis terhadap system ekonomi. Dari sini pergeseran pemaknaan liberal dimulai. Menurut rumusan Keynesian Negara ikut andil dalam ekonomi untuk melancarkan jalannya roda

ekonomi, kesejahteraan social dan penyerapan tenaga kerja.¹¹ Pada bagian lain, kaum liberal klasik yang tergabung dalam partai konservatif kanan mendengungkan kembali liberalism tersebut yang kemudian terkenal sesuai dengan aliran politiknya yakni Neo Konservatif atau kanan baru (*new right*). Para teoritis dan pengamat kemudian menyebutnya dengan neoliberal sesuai dengan aliran pemikirannya yang merupakan metamorphosis dari pemikiran liberal klasik ala Adam Smith dan David Ricardo.¹²

Teori Foreign direct investment, serta meggunakan konsep *Multinational Corporation*.

Foreign Direct Investment atau Investasi Asing Langsung dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan Negara lain. Foreign Direct Investment merupakan salah satu cirri dari sistem ekonomi yang men-globaL Teori Penanaman Modal Asing Langsung atau *Foreign Direct Investment (FDI)* merupakan salah satu faktor utama pendorong perekonomian Negara.¹³ *Foreign Direct Investment* dianggap lebih berguna bagi negara dibandingkan investasi pada ekuitas perusahaan karena investasi ekuitas berpotensi terjadinya capital outflow sebab investasi ekuitas ini lebih bersifat jangka pendek dan dapat ditarik secara tiba-tiba. *Foreign Direct Investment* bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara ini perusahaan yang ada di

⁹ Scott Burchill dan Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional* Bandung:Nusa Media, 2010), hlm.80.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Scott Burchill dan Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional* Bandung:Nusa Media, 2010), hlm.74

¹² Mochtar Mas'oed. 1997. Ekonomi Politik Internasional. Jogjakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM. Hal.7

¹³ Working Paper, Determinan FDI oleh Yati Kurniati. Bank Indonesia; 2007

negara asal (Home Country) bisa mengendalikan perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (Host Country) baik sebagian atau seluruhnya. Caranya dengan si penanam modal dapat membeli perusahaan di luar negeri yang sudah ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru disana atau membeli sahamnya sekurang-kurangnya 10%.¹⁴

Menurut Krugman (1994) *Foreign Direct Investment* merupakan arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Oleh karena itu tidak hanya terjadi pemindahan sumber daya, tetapi juga terjadi pemberlakuan kontrol terhadap perusahaan di luar negeri.¹⁵

Krugman juga berpendapat bahwa *Foreign Direct Investment* tidak hanya mencakup transfer kepemilikan asing, melainkan juga mekanisme yang memungkinkan investor asing untuk mempelajari manajemen control dari perusahaan dalam negeri. Selain itu Negara penerima (*Host Country*) *Foreign Direct Investment* juga akan menerima adanya keuntungan antara lain adanya ahli teknologi, dalam bentuk varietas baru dari *capital inputs* yang tidak dapat dicapai melalui investasi keuangan atau perdagangan barang dan jasa. *Foreign Direct Investments* ini juga dapat mempromosikan kompetisi Pasar domestic.¹⁶

Foreign Direct Investment memiliki beberapa keuntungan. Pertama aliran modal tersebut mengurangi resiko dari kepemilikan modal dengan melakukan diversifikasi melalui investasi. Kedua, Intergrasi global

pasar modal memberikan spread terbaik dalam pembentukan corporate governance, accounting rules, dan legalitas. Ketiga, mobilitas modal secara global membatasi kemampuan pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang salah.¹⁷

Foreign Direct Investment merupakan sumber pembiayaan luar negeri yang paling potensial dibandingkan dengan sumber lain, karena sumber arus modal (capital inflow) asing ini sebagian besar berada dinegara berkembang diakibatkan karena kesenjangan modal (gap of capital).¹⁸ Negara berkembang tidak sanggup mengawali industri dasar dan industri kunci secara mandiri. *Foreign Direct Investment* lebih menjamin keberlangsungan pembangunan suatu negara dibandingkan dengan pinjaman luar negeri. *Foreign Direct Investment* masuk ke negara-negara yang memiliki fundamental yang baik dan dapat membantu mengembangkan sistem keuangan domestik. *Foreign Direct Investment* dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi.

2. PEMBAHASAN

Pengertian Penanaman Modal Asing Secara Langsung (FDI)

Arus modal yang masuk dari luar negeri dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu utang luar negeri, investasi portfolio, dan penanaman modal asing langsung (*Foreign Direct Investment*). Secara umum, FDI adalah

¹⁴ Memahami Investasi Langsung Luar Negeri diakses dari (<http://dte.gn.apc.org/fid.htm>) pada 15 februari 2017 pukul 21:09 WIB

¹⁵ Investasi Asing Langsung dan Faktor yang mempengaruhinya diakses dari (Puslit2.petra.ac.id/gudangpaper/files/1767.pdf) pada 15 Februari 2017 pada pukul 22:00 WIB

¹⁶ Ibid

¹⁷ How Benefical is Foreign Direct Investment for Developing Countries diakses dari: //http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/06/loungani.htm pada 17 februari 2017 pukul 09:10 WIB

¹⁸ FDI and Stock Market Development: Complement or substitut? Diakses dari: www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubs-fdi-4.pdf pada 17 februari 2017 pukul 09:30 WIB

bentuk investasi yang ditanamkan langsung dan bergerak di berbagai bidang. Di dalam arus FDI tidak termasuk investasi portfolio global berbentuk saham lewat jual beli di bursa, obligasi dan surat berharga lainnya.¹⁹ Dibandingkan dengan hutang, FDI sering dianggap sebagai cara yang lebih menguntungkan dan lebih aman dalam membiayai pembangunan, selain karena faktor resiko kegagalan usaha dipegang oleh investor asing dimana pada hutang, negara berkewajiban untuk membayar utang beserta bunganya juga, karena FDI terkait dengan kepemilikan langsung, penguasaan pabrik, peralatan dan infrastruktur yang turut membiayai kapasitas penciptaan pertumbuhan dalam suatu perkenomian, sedangkan pinjaman luar negeri jangka pendek lebih sering digunakan untuk membiayai konsumsi.

Kebijakan Pemerintah Kota Dumai Dalam Penyelenggaraan Investasi

Melalui wewenang pemerintah daerah untuk mengatur pembangunan pada sektor-sektor unggulan maka akan tercipta pembangunan yang baik. Tiap kabupaten/kota dalam suatu propinsi memiliki keunggulan sektor yang berbeda yang dipengaruhi ketersediaan sumberdaya dan kondisi infrastruktur masing-masing.

Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, maka Pemerintah Dumai mengeluarkan beberapa regulasi terkait kebijakan daerah Kota Dumai yang terkait bidang investasi adalah sebagai berikut:

1. Perda Kota Dumai No. 3 Tahun 2011 Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Kota Dumai.

2. Peraturan Walikota Dumai No. 39 Tahun 2011 Tanggal 02 Mei 2011 Tentang Pendeklarasi Sebagian wewenang Pelayanan dan Penandatangan Perizinan Kepada Kantor/Badan Pelayanan Terpadu Kota Dumai
3. Kebijakan Pembangunan Nasional Untuk Kota Dumai (sesuai pp no. 26 tahun 2008 tentang RTRW arah): sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKSN), Pelabuhan Internasional, Kawasan Andalan Duri-Dumai Dan Sekitarnya. Kota Dumai Nominasi Menjadi KEKI (UU RI No. 39 Tahun 2009. Koridor Ekonomi Indonesia (Sumatra, Jawa,Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, Papua-Kep. Maluku) Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.
4. Perda Kota Dumai No. 27 Tahun 2005 Tanggal 26 Desember 2005 Tentang Perubahan Atas Perda No. 11 Tahun 2002 tentang Rencana Tataruang Wilayah Kota Dumai. Kota
5. Peraturan Walikota Dumai No. 39 Tahun 2011 Tanggal 02 Mei 2011 Tentang Pendeklarasi Sebagian wewenang Pelayanan dan Penandatangan Perizinan Kepada Kantor/Badan Pelayanan Terpadu Kota Dumai
6. Keputusan Walikota Dumai No. 298 Tahun 2011 Tanggal 05 Januari 2011 Tentang Pembentukan TIM Pelayanan Pengaduan Investor Kota Dumai (*investor complaint service board of Dumai City*).

¹⁹ Memahami Investasi Langsung Luar Negeri. Diakses dari: <http://www.downtoearth-.org/old-site/fifdi.htm>

[indonesia.org/old-site/fifdi.htm](http://www.indonesia.org/old-site/fifdi.htm) pada tanggal 22 juni 2017, pukul 12:22 WIB

Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Dumai tahun 2008 s.d 2012

Tahun	Uraian	PMD N	PM A	Tota l
2011	Jumlah Investor	44	22	66
2012		46	22	68
2013		51	28	79

Sumber: Bappeda Kota Dumai. Tahun 2015

Pengaruh MEA Terhadap Ekonomi Kota Dumai

ASEAN Community merupakan wujud dari kerjasama intra-ASEAN dalam Declaration of ASEAN Concord II di Bali, Oktober 2003. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan salah satu pilar dari perwujudan ASEAN Vision 2020, bersama-sama dengan ASEAN Security Community (ASC) dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC).²⁰

Salah satu wilayah di Indonesia yang akan merasakan dampak langsung dari Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah Kota Dumai. Kota Dumai merupakan salah satu penghasil kelapa sawit di Indonesia. Peluang Investasi Hilirisasi Industri Pengolahan Kelapa Sawit di Kota Dumai Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi unggulan di Indonesia, kelapa sawit diyakini mempunyai daya saing yang kuat dibandingkan minyak nabati lainnya seperti kedelai dan kelapa. Berdasarkan data Oil World, kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) di dunia akan mencapai 58 juta ton pada tahun 2020.

Jumlah Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) menjadi Minyak Sawit Mentah (CPO) sekitar 146 PKS dengan kapasitas 5.645 ton TBS/ jam. Sarana dan prasarana yang terdapat dikota Dumai sebagai pendukung kegiatan investasi seperti Bandar udara, pelabuhan laut maupun kawasan industri sudah tersedia.²¹

²⁰ Integrasi Ekonomi ASEAN 2015, <https://www.academia.edu/9503310/>(diakses tanggal 25 Juli 2015)

Berikut ini merupakan data tabel mengenai produksi CPO di Kota Dumai, yaitu:

Tabel 4.1 Produksi CPO di Kota Dumai

Biaya Produksi	Jumlah	Satuan	Biaya/Tahun (US \$)
Bahan Baku CPO	1,500,000	Ton/Tahun	1,209,000,000
Tenaga Kerja	150	Orang	483,871
Overhead Pabrik	10	%	2,740,343
Jumlah			1,212,224,214

Sumber: Bappeda Kota Dumai. 2015

Sasaran kebijakan pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, yang berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat terutama yang mempunyai keterbatasan ekonomi. Pemerintah Daerah bertekad untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia dengan berbagai cara penanggulangan kemiskinan sudah menjadi program vital pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan rencana pembangunan. Hal ini dikarenakan kemiskinan terus menjadimasalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai negara kesatuan. Salah satu Provinsi di Indonesia yang masih mengalami permasalahan dalam kemiskinan adalah Provinsi Riau.

Definisi integrasi ekonomi ASEAN secara umum adalah pencabutan atau penghapusan hambatan-hambatan ekonomi (*economic frontier*) antara perekonomian Negara-negara ASEAN.

Hambatan-hambatan ekonomi tersebut meliputi semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas

²¹ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai. 2012. Rencana Strategis Kota Dumai. Dumai. Bappeda. Hlm 21

barang, jasa, faktor produksi, dan juga aliran komunikasi, secara aktual maupun potensial

Oleh karena itu beberapa bentuk strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Dumai dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Investasi
2. Regulasi Investasi
3. Peningkatan sarana Infrastruktur
4. Pemerintah Kota Dumai Melaksanakan Program Usaha Ekonomi Simpan Pinjam dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat

3. KESIMPULAN

Investasi memang sangat penting sebagai motor utama perkembangan dan pengeluaran pemerintah ekonomi jangka panjang. Maka dari itu berdasarkan data-data dan berita yang disajikan telah terlihat jelas bahwa perkembangan investasi di Indonesia dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir selalu meningkat secara kuantitas, namun masih ada beberapa sektor dan alokasi investasi yang fluktuatif akan tetapi realisasi investasi sudah bisa merambah hingga ke wilayah Dumai.

Dengan adanya UU Penanaman Modal yang baru, salah satu pointnya berisi tentang kemudahan untuk menjalankan usaha sehingga hal itu dapat membuka kran bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia yang seharusnya pemerintah juga harus selektif terhadap hal tersebut.

Setelah berlakunya MEA di Kawasan ASEAN, hal tersebut berdampak pada sektor investasi di Indonesia. Terutama di Kota Dumai, dengan meningkatnya investasi tersebut akan berdampak pada meningkatnya perekonomian masyarakat kota Dumai .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.. *Rencana Strategis Kota Dumai. Dumai.* Bappeda. 2012

Mochtar Mas'oed.. *Ekonomi Politik Internasional*. Jogjakarta: Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL UGM.1997
Mochtar Mas'oed, Ilmu Hubungan Internasional: *Disiplin dan Metodologi*. LP3S. Jakarta. 1990

Robert Keohane, After Hegemony: *Cooperation and Discord in the World Political Economy* Princeton, New Jersey:Princeton University Press, 1984

Scott Burchill dan Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional* Bandung:Nusa Media, 2010

Winarno Surakmat, *Pengantar Metode ilmiah*.

Bahan Penerbit IKIP. Bandung. 1968.

Yati Kurniati. Working Paper, *Determinan FDI*. Bank Indonesia; 2007

Internet

Indonesia-China Free Trade Agreement Rules to Start in January 2010”,

<http://www.e-to-dina.com>

“Politik Luar Negeri”,

http://www.deplu.go.id/?hotnews_id=45

Memahami Investasi Langsung Luar Negeri.

<http://www.downtoearth-indonesia.org/old-site/fifdi.html>

Investasi Asing Langsung dan Faktor yang memperngaruhinya

<Puslit2.petra.ac.id/gudangpaper/files/1767.pdf>

How Benefical is Foreign Direct Investment for Developing Countries

<http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/06/loungani.htm>

FDI and Stock Market Development:

Complement or substitut?:

www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubs-fdi-4.pdf

Integrasi Ekonomi ASEAN 2015

<https://www.academia.edu/9503310/>